



WALIKOTA LUBUKLINGGAU

**SAMBUTAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
PADA ACARA
KEGIATAN PENDAMPINGAN DAN
SOSIALISASI APLIKASI SISTEM INFORMASI
KEARSIPAN DINAMIS (SIKD) DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU.**

SENIN, 16 MARET 2020

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

ASSALAMU'ALAIKUM, WR, WB

SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEMUA

YANG SAYA HORMATI,

- FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH
KOTA LUBUKLINGGAU ATAU YANG
MEWAKILI,
- PARA PEJABAT DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU,
- PARA NARA SUMBER KEGIATAN
- KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN KOTA LUBUKLINGGAU
-
-
-
-
-

MARILAH SAMA – SAMA KITA
PANJATKAN PUJI SYUKUR KE HADIRAT ALLAH
SWT TUHAN YANG MAHA ESA, YANG TELAH
MEMBERIKAN NIKMAT KESEHATAN DAN
KESEMPATAN SEHINGGA KITA DAPAT HADIR
BERSAMA PADA ACARA KEGIATAN
PENDAMPINGAN DAN SOSIALISASI APLIKASI
SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS
(SIKD) DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
LUBUKLINGGAU.

SHOLAWAT BESERTA SALAM MARI KITA
CURAHKAN KEPADA JUNJUNGAN KITA
BAGINDA NABI BESAR MUHAMMAD SAW,
BESERTA KELUARGA DAN SAHABATNYA,
SERTA PARA PENGIKUT SUNAH BELIAU
HINGGA AKHIR ZAMAN.

**BAPAK/IBU HADIRIN YANG
BERBAHAGIA,**

DITENGAH DERASNYA PERKEMBANGAN ARUS TEKNOLOGI INFORMASI DALAM LINGKUNGAN DUNIA GLOBAL SEHINGGA SEMUA AKSES INFORMASI BISA TERHUBUNG DENGAN CEPAT MELALUI JARINGAN INTERNET. HAL INI SETIDAKNYA TELAH MEMUNCULKAN BERBAGAI TUNTUTAN MASYARAKAT AGAR PEMERINTAH DAPAT MEMBERIKAN SISTEM PELAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN YANG CEPAT, AKURAT, OBJEKTIF DAN BERKUALITAS.

DISISI LAIN PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK MERUPAKAN MOMENTUM PENTING DALAM UPAYA MENDORONG TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PUBLIC

SEKALIGUS MERUPAKAN LANDASAN KONSTITUSIONAL DALAM SYSTEM LAYANAN INFORMASI PUBLIC.

UNTUK ITU TRANSPORMASI INFORMASI MELALUI SISTEM DIGITALISASI MERUPAKAN HAL YANG MUTLAK UNTUK DILAKUKAN, TERMASUK SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS (SIKD) KOTA LUBUKLINGGAU, SEBAGAI UPAYA KONKRIT KITA UNTUK MEMBANGUN EFEKTIVITAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI MELALUI SISTEM TATA KELOLA KEARSIPAN DAN PELAYANAN INFORMASI KEARSIPAN BERBASIS APLIKASI.

PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KEARSIPAN BERBASIS TEKNOLOGI INI DIHARAPKAN MAMPU MENJAWAB KEBUTUHAN MASYARAKAT AKAN PELAYANAN INFORMASI KEARSIPAN SECARA TRANSPARAN, EFEKTIF DAN EFISIEN.

TENTUNYA HAL INI SEJALAN DENGAN PROGRAM PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU DALAM RANGKA PERCEPATAN PEMBANGUNAN *SMART MOBILITY* DIBIDANG PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI SEHINGGA PROSES SURAT MENYURAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU DILAKSANAKAN SECARA CEPAT, AKURAT, AMAN DAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

TAHAPAN APLIKASI SIKD DIMULAI DARI OPD PENCIPTA ARSIP, RETENSI ARSIP HINGGA PENYUSUTAN ARSIP, YANG PELAKSANAANNYA SECARA SISTEMATIS MENGACU PADA RANCANG BANGUN PENGINTEGRASIAN ANTARA SISTEM KEARSIPAN DAN SISTEM KEGIATAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH, MERUPAKAN SEBUAH TEROBOSAN BESAR DARI LEMBAGA ANRI YANG

PATUT KITA APRESIASI DAN SANGAT KOLABORATIF.

BAPAK/IBU HADIRIN YANG SAYA HORMATI,

SEBAGAIMANA YANG KITA PAHAMI BERSAMA ARSIP MERUPAKAN REKAMAN KEGIATAN DAN PERISTIWA DALAM BERBAGAI BENTUK DAN MEDIA SESUAI DENGAN PERKEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI YANG DIBUAT DAN DITERIMA OLEH LEMBAGA NEGARA, PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA.

ARSIP ATAU DOKUMEN NEGARA INI MEMPUNYAI PERAN YANG SANGAT STRATEGIS DALAM MENSUKSESKAN PENYELENGGARAAN NEGARA KARENA ARSIP MERUPAKAN IDENTITAS DAN JATI DIRI BANGSA, SEKALIGUS SEBAGAI

MEMORI KOLEKTIF DAN BAHAN
PERTANGGUNGJAWABAN DALAM PENYELENGARAAN
PEMERINTAHAN.

BETAPA TIDAK KARENA ARSIP
SESUNGGUHNYA MEWARISKAN INFORMASI
BERHARGA KEPADA GENERASI MENDATANG. ARSIP
HADIR DALAM SETIAP SENDI KEHIDUPAN, BEGITU
DALAM, BEGITU LUAS.

DEKLARASI UNIVERSAL KEARSIPAN
MENGATAKAN BAHWA ARSIP MEREKAM
KEPUTUSAN, TINDAKAN, DAN MEMORI.
ARSIP MERUPAKAN WARISAN YANG TIDAK
TERGANTIKAN MELINTASI SATU GENERASI KE
GENERASI BERIKUTNYA.

UNTUK MENYELAMATKAN ARSIP, ADALAH
KEWAJIBAN KITA SEMUA KHUSUSNYA APARATUR
PEMERINTAH BAIK PEMERINTAH PUSAT MAUPUN
DAERAH UNTUK BERSAMA-SAMA MENJALANKAN

APA YANG TELAH DIAMANAHKAN DALAM UNDANG –
UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2009 TENTANG
KEARSIPAN.

KITA PUNYA PENGALAMAN LEPASNYA PULAU
SIPADAN-LIGITAN DARI NKRI 17 DESEMBER 2002,
DIMANA MAHKAMAH INTERNASIONAL
(*INTERNASTIONAL COURT OF JUSTICE*) DI DEN
HAAG BELANDA MEMUTUSKAN KEMENANGAN
MALAYSIA BERDASARKAN DOKUMEN EFFECTIVITEE
PEMERINTAH INGGRIS YANG MENJAJAH MALAYSIA,
BERUPA TINDAKAN ADMINISTRATIF PENERBITAN
ORDONANSI PERLINDUNGAN SATWA BURUNG DAN
PUNGUTAN PAJAK TAHUN 1930.

SEMENTAR PEMERINTAH INDONESIA
MENDALILKAN BAHWA KEPEMILIKAN ATAS
SIPADAN-LIGITAN MENDASARKAN PADA HASIL
KONVENSI ANTARA BELANDA DENGAN INGGRIS

PADA TAHUN 1891, TANPA MENYERTAKAN ARSIP/DOKUMEN LAINNYA YANG DAPAT MENGUATKAN BUKTI PRIMER ATAS PENGUASAAN DUA PULAU TERSEBUT, DIMANA ARGUMENT PEMERINTAH RI DITOLAK OLEH 16 DARI 17 HAKIM MAHKAMAH INTERNASIONAL.

DENGAN DEMIKIAN DAPAT KITA PAHAMI BETAPA PENTINGNYA ARSIP SEBAGAI DOKUMEN NEGARA, SEBAGAI BUKTI AUTENTIK ATAS KEPEMILIKAN SUATU WILAYAH (*EFFECTIVE OCCUPATION*).

BELAJAR DARI KEJADIAN DAN PERISTIWA MASA LALU BAHWA ARSIP MERUPAKAN ASET NEGARA YANG HARUS DISELAMATKAN DAN DILESTARIKAN, TIDAK SAJA DEMI KELANGSUNGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN JUGA UNTUK MENJAGA KEDAULATAN NEGARA.

MENJAGA NILAI KESEJARAHAN DAPAT MEMBERI MAKNA MENDASAR BAGI TERPELIHARANYA KEUTUHAN NKRI, DAN TERJAMINNYA AKSES INFORMASI UNTUK DIWARISKAN PADA GENERASI MENDATANG, SEHINGGA TIDAK ADA PEMBELOKAN ATAUPUN PENGKABURAN SEJARAH SEBAGAI IDENTITAS DAN JATI DIRI BANGSA.

PERAN STRATEGIS LEMBAGA KEARSIPAN MENJAMIN ARSIP YANG AUTENTIK, JUGA BERKONTRIBUSI UNTUK TERWUJUDNYA TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS SERTA KUALITAS PENYELENGGARAAN NEGARA.

TAK BERHENTI SAMPAI DISITU, ARSIP JUGA MAMPU MEMBERIKAN DUKUNGAN BAGI PERELINDUNGAN KEPENTINGAN NEGARA DAN HAK-HAK KEPERDATAAN RAKYAT.

SUNGGUH, BERDASARKAN PADA KESELURUHAN PERAN YANG DEMIKIAN, ADALAH MENJADI TUGAS KITA SEMUA, UNTUK DAPAT BERSAMA-SAMA MEMELIHARA DAN MENYELAMATKAN BUKTI-BUKTI SEJARAH SALAH SATUNYA DOKUMEN NEGARA YANG UTUH DAN LENGKAP AGAR SAMUA MEMORI NEGARA, BAIK MENGENAI KEJADIAN MASA LAMPAU, MASA SEKARANG DAN MASA YANG AKAN DATANG DAPAT TERJAMIN KEASLIANNYA.

BAPAK/IBU NARA SUMBER DARI ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA,

MELALUI KESEMPATAN YANG BAIK INI JUGA KAMI ATAS NAMA PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU MENYAMPAIKAN TERIMAKASIH DAN APRESIASI YANG SETINGGI-TINGGINYA

KEPADA LEMBAGA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.

BERDASARKAN HASIL AUDIT PENGAWASAN KEARSIPAN TAHUN 2019 TELAH MEMBERI PENGHARGAAN KEPADA PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU DENGAN KATEGORI "MEMUASKAN" DIBIDANG TATA KELOLA KERASIPAN.

DENGAN PERINGKAT 40 (EMPAT PULUH) DARI 508 (LIMA RATUS DELAPAN) PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-INDONESIA, YANG DISAMPAIKAN PADA RAPAT KOORDINASI PENGAWASAN KEARSIPAN NASIONAL, DI KOTA SOLO PROVINSI JAWA TENGAH, BELUM LAMA INI.

NAMUN DEMIKIAN MASIH BANYAK PERMASALAHAN YANG HARUS KITA BENAHI BERSAMA BAIK DIBIDANG PENGOLAHAN MAUPUN PENGAWASAN KEARSIPAN.

DIANTARANYA TENTANG REGULASI DIMANA KETENTUAN DAN PERATURAN YANG BERKAITAN DENGAN PENYELENGGARAAN KEARSIPAN MASIH BERSIFAT PARSIAL DAN TERSEBAR DALAM BERBAGAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BAIK YANG ADA DIKEMENTERIAN MAUPUN LEMBAGA SEJAJAR KEMENTERIAN.

KITA BERHARAP PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DI MASA YANG AKAN DATANG BISA BERSIFAT TERPADU, SISTEMATIS DAN KOMPREHENSIF.

TENTUNYA HAL INI MEMBUTUHKAN SINERGISITAS ANTAR LEMBAGA/ KEMENTERIAN DAN UNSUR PENYELENGARA NEGARA LAINNYA DALAM MEMAHAMI AKAN ARTI PENTINGNYA ARSIP DALAM SEBUAH SISITEM PEMERINTAHAN.

KEGIATAN PENDAMPINGAN DAN SOSIALISASI SIKD YANG KITA LAKSANAKAN PADA HARI INI, DIHARAPKAN MAMPU MEMBERIKAN SISTEM LAYANAN INFORMASI DAN TATA KELOLA KEARSIPAN YANG TERBAIK BAGI UNSUR PENYELENGARA NEGARA DAN MASYARKAT.

REVOLUSI TEKNOLOGI INFORMASI INI JUGA DIMAKSUDKAN UNTUK MEMBANGUN SYSTEM PEMERINTAHAN YANG BERSIFAT TERBUKA DAN KOLABORATIF.

BAPAK/IBU NARASUMBER, PARA UNDANGAN DAN PESERTA SOSIALISASI YANG BERBAHAGIA.

MELALUI KEGIATAN SOSIALISASI PADA HARI INI ADALAH MOMENTUM PENTING BAGI KITA ASN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU, UNTUK MEMAKNAI ARSIP SEBAGAI

PILAR *GOOD AND CLEAN GOVERNANCE* SEKALIGUS
SEBAGAI INTEGRASI MEMORI KOLEKTIF BANGSA.

TENTUNYA HAL INI HARUS MENJADI
MOTIVASI BAGI PARA ASN UNTUK DAPAT
MELAKUKAN PENGELOLAAN DAN PENATAAN ARSIP
YANG BAIK DAN PROSEDURAL SEHINGGA DAPAT
MEMBERIKAN JAMINAN KETERSEDIAAN ARSIP
YANG AUTENTIK, TERINTEGRASI DAN
TERPERCAYA.

KETENTUAN PASAL 84 UNDANG-UNDANG
NOMOR 43 TAHUN 2009 MENYATAKAN BAGI
PEJABAT YANG DENGAN SENGAJA TIDAK
MELAKSANAKAN PEMBERKASAN DAN PELAPORAN
ARSIP SEBAGAIMANA YANG DIMAKSUD DALAM
PASAL 43 AYAT (1) DAPAT DIPIDANA DENGAN
PIDANA PENJARA PALING LAMA 10 (SEPULUH)
TAHUN.

DEMIKIAN PULA DALAM PASAL 88 MENYATAKAN BAGI PIHAK KETIGA YANG TIDAK MENYERAHKAN ARSIP YANG TERCIPTA DARI KEGIATAN YANG DIBIYAI DENGAN ANGGARAN NEGARA SEBAGAIMANA YANG DIMAKSUD DALAM PASAL 58 AYAT (3) DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA PALING LAMA LIMA TAHUN.

UNTUK ITU SAYA BERHARAP ADA KOMITMEN BERSAMA BAGI APARATUR SIPIL NEGARA KHUSUSNYA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU, UNTUK MENJADI KATALISATOR TERCIPTANYA TATA KELOLALA KEARSIPAN YANG BAIK SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

SAYA JUGA INGIN MEMASTIKAN BAHWA KEGIATAN INI BUKANLAH SEKADAR PENGEMBANGAN WACANA YANG SIFATNYA SEREMONIAL DAN TIDAK PRODUKTIF,

SEKEMBALINYA NANTI DI TEMPAT TUGAS MASING-
MASING PARA PESERTA HARUS DAPAT
MENGIMPLEMENTASIKAN TENTANG TATA CARA
PENGELOLAAN DAN PENATAAN ARSIP YANG
PROFESIONAL, VISIONER, SINERGI DAN
AKUNTABEL MELALUI APLIKASI SIKD KOTA
LUBUKLINGGAU.

***BAPAK/IBU HADIRIN YANG SAYA
HORMATI,***

DEMIKIAN YANG DAPAT SAYA SAMPAIKAN
PADA KESEMPATAN IN, AKHIRNYA DENGAN
SENANTIASA MEMOHON RIDHO DARI ALLAH SWT,
DAN DENGAN MENGUCAPKAN
"BISMILLHIRROHMANIRROHIM" KEGIATAN
PENDAMPINGAN DAN SOSIALISASI APLIKASI
SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS (SIKD)
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA

LUBUKLINGGAU TAHUN 2020, DENGAN INI RESMI
SAYA NYATAKAN **DIBUKA.**

*SEKIAN DAN TERIMA KASIH
WASSALAMU'ALAIKUM WR.WB*

WALIKOTA LUBUKLINGGAU

H. SN PRANA PUTRA SOHE